

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdoellah, P. (2016). *Revitalisasi Kewenangan PTUN Gagasan Perluasan Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ahmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anggara, S. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Aritonang, D. M. (2019). *Aspek Hukum Penyelenggara Administrasi Publik di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2004). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Basah, S. (1985). *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*. Bandung: Alumnus.
- Bimasakti, M. A. (2018). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah/Onrechtmatige Overheidsdaad dari Sudut Pandang Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Caroline, M., & Anthoni. (2021). *Tindakan Pejabat Administrasi Pemerintahan: Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Fuady, M. (2013). *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditiya bakti.
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- HR, R. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ilmar, A. (2018). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kansil, C., & Kansil, C. S. (2005). *Modul Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- MD, M. M. (2011). *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Muliadi, A. (2014). *Politik Hukum*. Padang: Akademia Permata.
- Permana, T. C. (2016). *Catatan Krisis Terhadap Perluasan Kewenangan Mengadili Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Genta Press.
- Pieris, J. (207). *Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Santoso, A. P. (2019). *Hukum Administrasi Negara (Sebuah Pengantar bagi Mahasiswa)*. Yogyakarta: Pramana Publishing.
- Senoadji, O. (1996). *Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Seruling Masa.
- Setiawan, Y., & Hadiatmojo, B. D. (2017). *Hukum Administrasi Negara: Teori dan Praktik (dilengkapi dengan beberapa kasus pertanahan)*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Soehino. (1998). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Solechan. (2019). *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pelayanan Publik*.
- Syarif, H. I. (2022). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

2. Peraturan perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad);. (t.thn.).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (t.thn.).

UUD 1945 dan amandemennya, Media Centre

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Kependudukan (UU RI No.30 Tahun 2014 dan UU RI No. 24 Tahun 2013) . (t.thn.). Sinar Grafika.

(Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU RI No. 51 Th. 2009) Dilengkapi dengan UU RI No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Atas UU RI No. 5 Th. 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara UU RI No. 5 Tahun 1986. (t.thn.). Jakarta: Sinar Grafika.

3. Jurnal/website/tulisan ilmiah

Kesbangpollinmas. (2017, 7 22). *Kesadaran Berbangsa dan Bernegara*. Diambil kembali dari Badan Kesatuan dan Politik Pemerintah Kabupaten Klungkung: <https://kesbangpollinmas.klungkungkab.go.id/2017/06/22/kesadaran-berbangsa-dan-bernegara>

Simanjuntak, N., MS, T., & Saragih, R. V. (2021). Harmonisasi Pengaturan Tentang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Salah Satu Sarana Investasi Bagi Masyarakat dan Sumber Pendanaan Bagi Pemerintah. *Jurnal To-ra*, 319.

Sitanggang, R. W. (2021). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Suatu Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 45/PUU-X/2011 Tentang Kehutanan. 24.

